

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kehidupannya pasti mengadakan hubungan dengan orang lain, baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat atau tempat bekerja. Dalam melakukan hubungan tersebut tentunya berbagai macam cara dan kondisi dapat saja terjadi. Ada hubungan yang dilakukan itu berakhir dengan kedamaian, tetapi ada juga dalam hubungan tersebut berakhir dengan pelanggaran hukum, yang dapat berlanjut ke pengadilan.

Memang hal tersebut tidak dapat dihindari oleh setiap orang, karena setiap orang pasti akan berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu ditekankan agar dalam melakukan hubungan dengan orang lain senantiasa memperhatikan ketentuan dan aturan yang berlaku, agar tidak salah arah dan dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri.

Kerugian dapat saja muncul sebagai akibat dari suatu hubungan dengan orang lain, baik hubungan secara pribadi maupun hubungan bisnis atau perdagangan. Dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini sudah patut disadari bahwa dalam dunia bisnis seseorang tidak hanya menghitung keuntungan tetapi juga harus menghitung risiko yang akan muncul dari hubungan tersebut.

Demikian juga halnya dalam hubungan jual beli antara penjual dan pembeli. Si penjual harus bertanggungjawab atas barang yang ia jual, sedangkan si pembeli berhak atas barang yang ia beli dan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dari barang yang ia beli tersebut. Di sini si pembeli sebagai konsumen harus dilindung haknya, para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan

seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Adapun konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.¹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut.²

Sebagaimana yang dialami oleh Ny. Sri Astuti Subasti, yang pada tanggal 3 Agustus 2010 telah membayar uang tanda jadi atau DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Kantor PT. Agung Automall Jl. Dr. Sutomo No. 13 Pekanbaru, untuk pemesanan mobil Type Hylux *Double Cabin* yang diinginkan oleh Ny. Sri Astuti Subasti (pembeli), yang harus melalui *inden* (pesanan) terlebih dahulu dari Jakarta yang memakan waktu selama 3 (tiga) bulan. Pemesan (pembeli) mendapatkan kwintansi pembayaran beserta bukti Surat Pemesanan Kendaraan yang ditandatangani oleh Andik S. Witjaksono dan Sudung Lumbangaol.

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2010, pemesan (pembeli) ditelepon oleh bagian *marketing* PT. Agung Automall dan disuruh menyetor kembali uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan cara mentransfer ke rekening *marketing* dan pembeli mendapatkan kwintansi pembayaran dan bukti Surat Pemesanan Kendaraan yang ditandatangani oleh Andi S. Witjaksono dan Sundung Lumbangaol.³

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2002), h.227

²*Ibid.*

³Berkas Perkara No.188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr

Setelah masa *inden* jatuh tempo, mobil Type Hylux *Double Cabin* yang dipesan pembeli juga tidak kunjung tiba, akhirnya pemesan (pembeli) mengalihkan pesanan ke unit lain yaitu Grand New Type V Luxury warna *Black Mica* dengan harga OTR Rp. 290.100.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu). Permintaan pemesan tersebut disetujui oleh PT. Agung Automall, namun setelah ditunggu-tunggu mobil yang dipesan tersebut juga tidak pernah tiba, dan dalam beberapa bulan pemesan (pembeli) tidak pernah dihubungi lagi oleh PT. Agung Automall.

Setelah beberapa bulan berlalu, maka pada tanggal 23 Mei 2011 pemesan (pembeli) kembali dihubungi oleh *marketing* PT. Agung Automall dan mengatakan, bahwa supaya mobil yang dipesan cepat datang, maka pemesan harus membayar sampai sekitar 75%, dan harus mentransfer uang ke rekening BCA PT. Agung Automall dengan Nomor Rekening 0341188333 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Pembeli (pemesan) yang tidak mengetahui dengan system yang ada pada perusahaan PT. Agung Automall selalu percaya saja dengan instruksi yang dikatakan oleh *marketing* PT. Agung Automall, sehingga uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Setelah pembayaran tersebut dilakukan, si pemesan (pembeli) belum juga mendapatkan mobil yang dipesan. Kemudian pada tanggal 19 September 2011, *marketing* PT. Agung Automall menghubungi pembeli dan meminta untuk segera melunasi pembelian mobil sebesar Rp.75.100.000,- (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).⁴

Pada waktu itu *marketing* PT. Agung Automall memberikan nomor rekening BRI miliknya atas nama Lirawan Ekavani dan mengatakan akan meneruskan uang yang dikirim dari rekeningnya ke PT. Agung Automall. Setelah uang tersebut ditransfer, maka pada tanggal 26 September 2011 pihak pemesan disuruh mengambil mobil pesanan pada PT.

⁴*Ibid.*

Agung Automall. Kemudian pemesan menyuruh anaknya untuk pergi mengambil mobil yang dibeli di PT. Agung Automall, akan tetapi mobil yang dijanjikan tersebut ternyata tidak ada.

Pada waktu berada di Kantor PT. Agung Automall, anak pemesan (pembeli) mendapatkan informasi dari karyawan PT. Agung Automall, bahwa *marketing* yang bernama Lirawan Ekavani sudah tidak bekerja lagi pada PT. Agung Automall semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu. Mendengar informasi tersebut maka pemesan merasa sedih dan bercampur kecewa dengan pelayanan PT. Agung Automall yang tidak profesional karena pemesan merasa dibohongi.

Oleh karena mobil yang dibeli tidak ada dan uang si pembeli hilang begitu saja akibat membeli mobil pada PT. Agung Automall, maka pembeli meminta kepada PT. Agung Automall untuk menunjukkan tanggung jawabnya baik secara hukum maupun secara sosial dengan mengembalikan uang milik pembeli. Si pembeli yang beritikad baik dan sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum dan undang-undang, apalagi mobil yang dipesan (*inden*) tidak pernah ada diberikan oleh PT. Agung Automall.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Hak si pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka.⁶ Sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Maret 1982 No.1230 K/Sip/1980, yang amar putusannya berbunyi: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang”.

Sehubungan dengan kasus di atas sudah dibawa kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru, namun menurut pemohon (pembeli) Majelis BPSK

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), h.79

⁶A. Q. Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.46

kurang mendalami isi dari pasal-pasal yang ada dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga penetapan ganti rugi atas hilangnya uang pemohon pada PT. Agung Automall dipertimbangkan setengah hati.

Putusan yang diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru No.10/pts/BPSK/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat mengembalikan dana sebanyak yang telah disetorkan sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dikabulkan.
 - b. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikabulkan.
 - c. Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dikabulkan.
3. Menolak untuk selebihnya Rp.75.100.000,- (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) ditolak, tidak dapat dibuktikan.
4. Tuntutan immaterial penggugat sebesar Rp.291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah), ditolak oleh Majelis demi keadilan.⁷

Dari putusan tersebut Majelis BPSK Pekanbaru tidak mempertimbangkan secara keseluruhan apa yang menjadi kerugian bagi pihak pembeli (pemesan), karena uang sebesar Rp.75.100.000,- (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang telah pembeli setorkan melalui *marketing* PT. Agung Automall menurut majelis tidak dapat dibuktikan, sedangkan bukti setoran ada pada pemesan (pembeli). Dengan alasan bahwa bahwa uang sejumlah Rp.75.100.000,- (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut penulis setorkan kepada *marketing* dan tidak disetorkan kepada PT. Agung Automall, sehingga uang tersebut tidak menjadi tanggung jawab PT. Agung Automall.

⁷Putusan Perkara No.188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr

Namun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”⁸

Dari isi pasal tersebut di atas jelas bahwa *marketing* yang bekerja pada PT. Agung Automall tersebut adalah menjadi tanggung jawab perusahaan, demikian juga halnya dengan tindakan dan perbuatan dari *marketing* tersebut juga menjadi tanggungjawab PT. Agung Automall, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan *marketing* tersebut juga menjadi tanggung jawab perusahaan. Namun dalam putusannya Majelis BPSK Pekanbaru tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Oleh karena itu pihak pembeli merasa keberatan dengan putusan Majelis BPSK Pekanbaru dan meminta pembatalan terhadap putusan tersebut, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru membuat putusan yang baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa: “Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

⁸R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.311

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁹

Sehubungan dengan alasan permintaan pembatalan terhadap putusan Majelis BPSK pekanbaru, bahwa pihak PT. Agung Automall tidak menunjukkan semua bukti yang telah dikeluarkan, sehingga bukti-bukti setorang dari pihak pembeli tidak ditunjukkan seluruhnya. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim BPSK tidak memuaskan.

Dari hasil pemeriksaan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara No.188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh PT. Agung Automall.
2. Mengabulkan permohonan dari pihak pembeli (Sri Asti Subasti).
3. Memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru No.10/Pts/BPSK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
 - b. Menghukum tergugat mengembalikan dana kepada penggugat sebanyak yang telah disetorkan sebesar Rp.252.550.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Setoran I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 2. Setoran II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

⁹ Abd. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), h.180

3. Setoran III sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 4. Setoran IV (terakhir) sebesar Rp.37.550.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
 - d. Menghukum tergugat PT. Agung Automall untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dapat dilihat ada perbedaan dengan putusan yang diberikan oleh Hakim BPSK, yang hanya menghukum tergugat untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), jelas penggugat merasa kurang puas karena di samping kerugian yang nyata yang dialami oleh penggugat, yakni telah menyetorkan uang sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga kerugian yang immaterial yang dialami oleh penggugat akibat ketidakprofesionalan PT. Agung Automall sehingga uang penggugat telah tertahan cukup lama.

Di sini terlihat pula bahwa ada perbedaan pertimbangan antara majelis hakim BPSK dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan kajian terhadap perbedaan tersebut, dengan cara membahas kedua putusan tersebut secara hukum dan membandingkan dengan pendapat-pendapat ahli dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini dengan mengambil judul penelitian sebagai berikut: “KAJIAN TENTANG KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PEKANBARU DALAM PERKARA NOMOR 188/PDT/ARB-BPSK/ 2011/PN.PBR”.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan judul di atas, maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada pertimbangan Majelis Hakim BPSK dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan, serta akibat hukum bagi para pihak terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK//2011/ PN.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim BPSK dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr?
2. Apakah akibat hukum bagi para pihak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim BPSK dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 188/Pdt/ ARB-BPSK/2011/PN.Pbr.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum mengenai perlindungan konsumen, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak agar dalam melakukan kegiatan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha atau bisnis, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang berhubungan dengan pelaku bisnis atau dunia usaha.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap perlindungan konsumen (Studi Kasus Putusan Hakim BPSK dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK/ 2011/PN.Pbr).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menerangkan dan menggambarkan data yang diperoleh melalui pengkajian kasus Nomor 188/Pdt/ ARB-BPSK/2011/PN.Pbr, yang berkenaan dengan pertimbangan dan akibat hukum yang terungkap dalam persidangan.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yakni yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berupa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/Pdt/ ARB-BPSK/2011/PN.Pbr.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli mengenai Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰

4. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.¹¹ Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yakni diuraikan secara sistematis dengan uraian kalimat berdasarkan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Dalam bab ini diuraikan tentang Gambaran Perkara, Alasan-alasan Pengajuan Gugatan.

¹⁰ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 97.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 225.

Bab III: Berisi Tinjauan Umum, yakni Pengertian Perlindungan Konsumen, Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa, dan Prosedur Beracara Arbitrase.

Bab IV: Berisi Pembahasan dan Hasil Penelitian yang terdiri atas, Pertimbangan Hakim BPSK dan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Memutuskan Perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr, serta Akibat Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 188/Pdt/ARB-BPSK/2011/PN.Pbr.

Bab V: Merupakan bab Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Di samping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.